

Tiongkok Kritik Politisasi Penerapan Teknologi 5G

2019-09-04 11:20:56

<http://indonesian.cri.cn/20190904/9855cc25-c2f8-a599-3bd9-75c7524c6114.html>

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang dalam jumpa pers kemarin (3/9) mengatakan, mempolitisasi masalah kerja sama teknologi 5G tidak hanya tidak menguntungkan bagi perkembangan teknologi 5G, juga tidak sesuai dengan prinsip persaingan adil, dan melanggar kepentingan bersama masyarakat internasional.

Diberitakan, AS dan Polandia pada hari Senin (2/9) menandatangani "pernyataan keamanan 5G", yang menekankan "hanya distributor atau pemasok yang andal dan dapat dipercaya boleh ikut serta dalam pembangunan jaringan 5G", dan penyedia jasa itu harus dijamin bebas dari kontrol pemerintah dan bisnisnya berada sesuai dengan mekanisme hukum yang transparan. Pernyataan tersebut tidak menyebut nama perusahaan mana pun, akan tetapi, dilansir beberapa media bahwa AS meminta negara-negara sekutunya, termasuk Polandia mengeliminasi Huawei Tiongkok dari pembangunan jaringan 5G.

Menanggapi pernyataan bersama AS dan Polandia tersebut, Geng Shuang menunjukkan, Tiongkok mencatat bahwa sebelumnya baik Presiden maupun Perdana Menteri Polandia pernah berjanji akan memperlakukan perusahaan Tiongkok di Polandia secara adil dan tidak akan menerapkan langkah diskriminatif terhadap negara atau perusahaan mana pun. Tiongkok berharap Polandia dapat memenuhi perjanjiannya.

Geng Shuang menunjukkan, untuk sementara waktu, AS yang tanpa bukti apa pun terus menggunakan kekuatan negara untuk menekan perusahaan Tiongkok. Tindakannya itu tidak terpuji dan tidak bermoral. AS selama ini terus secara terang-terangan memaksa bahkan mengancam negara lain untuk mengambil pendiriannya yang sama dengan AS dalam menggencet perusahaan Tiongkok. Tiongkok mendesak AS menghentikan tindakan unilateralisme dan hegemonismenya, menghentikan fitnahan dan tuduhan terhadap Tiongkok, menghentikan penggencetan terhadap perusahaan Tiongkok.